

RESEARCH ARTICLE

JURNAL
NOMOSLECA

RESISTENSI TOKOH HINDU BALI TERHADAP KELOMPOK SAMPRADAYA DI MEDIA SOSIAL

I Komang Agus Widiantera¹ | I Gusti Ngurah Aan Darmawan¹ | I Nyoman Buda Asmara Putra¹ | Roni Han Wasisto¹ | Wayan Supada¹

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi,
Jurusan Dharma Duta, STAHN Mpu
Kuturan Singaraja

Jl. Pulau Menjangan No 27,
Banyuning, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng – Bali
81119

Correspondence
I Komang Agus Widiantera
Email: awitaraa@gmail.com

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n>

Abstract: *This study examines the resistance of Hindu figures in Bali to sampradaya groups, especially Hare Krishna and Sai Baba, which developed through social media. Using a qualitative approach, this study aims to understand the rejection of sampradaya as an organized public movement that demands the revocation of the legality and protection of organizations affiliated with the group. Simmel's theory of social conflict is used to explain the conflict of values and norms between Hindu figures and sampradaya. Through the analysis of social media discourse, it was found that Hindu figures actively built digital networks which were then followed by actions in the field. This resistance not only reflects the rejection of sampradaya teachings, but also shows the dynamics of broader social polarization. Negative narratives, verbal attacks, and stereotypes spread through social media contribute to tensions between groups and increase the potential for religious conflict. This study highlights the importance of building open dialogue spaces between religious groups to prevent further conflict and create cross-traditional understanding. These findings also reflect the complexity of the relationship between local Hindu traditions and the influence of modernity in contemporary Balinese society. This study makes an important contribution to the study of religion and culture in Indonesia, while encouraging further research in the context of tolerance and social diversity.*

Keywords: *Resistency, Sampradaya, social Media*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji resistensi tokoh Hindu di Bali terhadap kelompok sampradaya, khususnya Hare Krishna dan Sai Baba, yang berkembang melalui media sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan memahami penolakan terhadap sampradaya sebagai gerakan publik terorganisir yang menuntut pencabutan legalitas dan pengayoman organisasi yang berafiliasi dengan kelompok tersebut. Teori konflik sosial dari Simmel digunakan untuk menjelaskan pertentangan nilai dan norma antara tokoh Hindu dan sampradaya. Melalui analisis wacana media sosial, ditemukan bahwa tokoh-tokoh Hindu aktif membangun jejaring digital yang kemudian dilanjutkan dengan aksi di lapangan. Resistensi ini tidak hanya mencerminkan penolakan terhadap ajaran sampradaya, tetapi juga memperlihatkan dinamika polarisasi sosial yang lebih luas. Narasi negatif, serangan verbal, dan stereotip yang tersebar melalui media sosial berkontribusi pada ketegangan antar kelompok dan memperbesar potensi konflik agama. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun ruang dialog yang terbuka antar kelompok keagamaan untuk mencegah konflik lebih lanjut dan menciptakan pemahaman lintas tradisi. Temuan ini juga merefleksikan kompleksitas relasi antara tradisi Hindu lokal dengan pengaruh modernitas dalam masyarakat Bali kontemporer. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam kajian agama dan budaya di Indonesia, sekaligus mendorong penelitian lanjutan dalam konteks toleransi dan keberagaman sosial.

Kata Kunci: Resistensi, Sampradaya, Media Sosial

1 | PENDAHULUAN

Eksistensi kelompok sampradaya di Indonesia sudah dikenal oleh umat Hindu tahun 1970-an. Kehadirannya memberikan warna dan dinamika dalam kehidupan beragama khususnya di Pulau Dewata. Sampradaya secara sederhana bisa dimaknai sebagai komunitas atau aliran spiritual yang berakar dari tradisi Hindu. Istilah "sampradaya" dalam konteks agama Hindu merujuk pada aliran atau tradisi yang memiliki ajaran, pemimpin, dan sistem kepercayaan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun.

Widiana (2022) menguraikan bahwa sampradaya merupakan arus tradisi dan teologi yang disampaikan secara oral dan melalui proses inisiasi. Hal ini umumnya digunakan oleh dua aliran besar dari India yakni Siwa dan Waisnawa (wisnu). Sampradaya juga sering kali memiliki interpretasi teologis, ritual, dan praktik keagamaan yang berbeda, meskipun semuanya tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti dari ajaran Weda atau Hindu (Adi et al., 2023)

Dinamika sampradaya kemudian mengalami perkembangan pesat dan diiringi dengan wacana dan stereotip beragama di kalangan umat Hindu Bali. Para pengikut sampradaya kemudian digunakan untuk menunjuk hampir semua komunitas yang mempelajari dan menerapkan spiritualitas Hindu gaya baru yang datang dari India pada kurun waktu 1980-an hingga sekarang (Devita, 2020). Penelitian mengenai penolakan dan larangan aktivitas sampradaya sesungguhnya sudah menjadi sorotan akademisi Hindu di Indonesia. Gayatri (2021) menyoroti fenomena gerakan masyarakat Hindu menolak pengayoman ideologi dan organisasi transnasional Sampradaya di Parisada Hindu Dharma Indonesia (majelis tertinggi umat Hindu) di Bali. Fenomena ini membaca pergulatan dan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu yang tergabung dalam berbagai organisasi massa Hindu pada tahun 2021. Penolakan yang dilakukan oleh komponen umat Hindu tersebut berangkat dari beberapa alasan mendasar yakni secara teologi, Hindu di Indonesia tidak menuhankan para pimpinan atau pemuka spiritual seperti yang dilakukan oleh para pengikut Sampradaya yakni Hare Krisna, Sai Baba dan lainnya.

Ulum & Firdausi (2021) mengurai benang kusut serta akar sejarah penolakan sampradaya di Bali sejak tahun 1984 khususnya dari kelompok Hare Krishna. Riset ini menyimpulkan bahwa interaksi kelembagaan antara kedua pihak mengalami kebuntuan, meskipun selama ini masih terdapat katup pengaman yaitu *Nyama Baraya* (nilai-nilai persaudaraan), namun potensi konflik tetap muncul.

Kuckreja (2022) menilai kiprah Hare Krishna dan sampradaya sejenisnya belum seutuhnya diterima disebabkan karena penolakan terjadi selama era represif Presiden Suharto. Eksklusivisme yang dibangun oleh sebagian pengikut Hare Krishna membuat tidak nyaman penganut Hindu Bali tradisional. Sementara Widiana (2022) menyoroti kelembaan majelis tertinggi umat Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam polemik penolakan sampradaya selama ini diberbagai daerah. Penolakan atas eksistensi dan dinamika para pengikut sampradaya di Pulau Dewata menjadi perhatian bahwa PHDI belum sepenuhnya bisa menjadi mediator. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dwipayana (2022) yang, merefleksikan pergulatan majelis Hindu yang begitu dramatis karena memberikan angin segar dan ruang kepada sampradaya dalam agenda musyaraf nasional (Mahasabha) PHDI yang sekaligus memberikan "legalitas" atas eksistensinya di Indonesia.

Analisis wacana Foucault menyediakan kerangka kritis untuk memahami bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan perlawanan dibangun melalui bahasa dan representasi (Foucault, 2022; Agustin, 2009). Dalam pandangannya, wacana bukan hanya tentang komunikasi, tetapi sistem yang mendefinisikan apa yang dianggap benar, siapa yang berwenang untuk berbicara, dan bagaimana realitas sosial diproduksi. Dalam konteks perlawanan Hindu terhadap kelompok sampradaya seperti Hare Krishna dan Sai Baba (Budiasa, 2016; Dwipayana, 2021), media sosial beroperasi sebagai ruang diskursif yang kuat di mana narasi dominan tentang keaslian dan legitimasi agama diperebutkan dengan angak yang sangat melonjak (Dimas, 2022; Nugroho, 2020). Para pemimpin dan pemengaruh Hindu secara aktif membangun wacana yang memosisikan sampradaya sebagai sesuatu yang menyimpang, asing, atau tidak sesuai dengan identitas Hindu Bali setempat, dengan demikian berupaya untuk menegaskan kembali otoritas agama tradisional di ruang publik digital (Firdaus & Sidik, 2024; Faizin et al., 2025). Hal ini sama halnya dengan kasus radikalisme di agama Islam (Jamri & Jajang, 2004).

Perlawanan ini tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga sangat politis. Melalui pesan yang konsisten, penggunaan simbol-simbol agama, dan seruan untuk kemurnian budaya, para aktor ini memobilisasi sentimen publik dan dukungan kelembagaan untuk mendelegitimasi kelompok sampradaya (Rosidin, 2021). Konsep Foucault tentang kekuasaan yang terdesentralisasi dan relasional terbukti di sini: media sosial memungkinkan tidak hanya komunikasi dari atas ke bawah tetapi juga wacana lateral yang digerakkan oleh komunitas yang memperkuat norma dan batasan kolektif (Widayati et al., 2021). Kampanye, tagar, dan petisi daring digunakan secara strategis untuk membentuk persepsi publik, menekan lembaga pemerintah, dan membangun rasa ancaman bersama dari gerakan spiritual alternatif ini (Setyaningsih, 2020; Fahmi et al., 2021). Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan beredar melalui wacana dan dijalankan melalui bahasa sehari-hari, gambar, dan interaksi sosial, alih-alih dipegang oleh satu otoritas.

Pada saat yang sama, Foucault menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ juga ada perlawanan. Platform yang digunakan untuk menegaskan dominasi atas sampradaya juga menjadi ruang negosiasi dan perlawanan balik. Sementara tokoh Hindu yang dominan berusaha meminggirkan kelompok-kelompok ini, pengikut sampradaya mungkin juga terlibat dalam strategi diskursif untuk mempertahankan keyakinan mereka, membingkai ulang tuduhan, atau menarik nilai-nilai yang lebih luas seperti kebebasan beragama dan toleransi. Dengan demikian, media sosial menjadi arena dinamis tempat wacana berbenturan, bergeser, dan berkembang, yang mencerminkan kompleksitas identitas agama, politik budaya, dan modernitas digital. Melalui sudut pandang Foucault, kasus ini menggambarkan bagaimana wacana merupakan tempat kontrol sekaligus ruang perjuangan, yang membentuk tidak hanya apa yang dikatakan tetapi juga apa yang dapat dibayangkan dalam suatu masyarakat.

Kritik dan penolakan sampradaya di ruang publik yang menjadi sorotan peneliti sebelumnya sesungguhnya memiliki diferensiasi sekaligus memperkuat penelitian ini yang memfokuskan pada ruang lingkup aktivisme digital. Berdasarkan argument di atas, peneliti akan menganalisis lebih jauh dinamika resistensi tokoh Hindu terhadap Sampradaya, wacana dan upaya dari tokoh kontra Sampradaya mempengaruhi umat Hindu di ruang digital dan implikasi penolakan Sampradaya terhadap umat Hindu di Bali, Kelompok Sampradaya hingga Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

2 | METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam kajian ini untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjektif dan kompleks. Metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna dan interpretasi dari data yang dikumpulkan, bukan hanya pada fakta yang diukur secara kuantitatif (Priyatno, 2017; Dhona, 2019). Penelitian ini berparadigma kritis (Bungin, 2020) dengan menarasikan dan mendeskripsikan studi kasus penolakan sampradaya yang massif terjadi di media sosial. Informan yang dihadirkan disini merepresentasikan tokoh yang pro maupun kontra terhadap eksistensi sampradaya. Disamping itu memperkuat hasil temuan di lapangan penelitian mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dengan dua informan tokoh Hindu, observasi dan menganalisis pemberitaan media media sosial maupun media online. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP) mulai dari catatan harian, transkrip, coding, kategori, tema dan memos.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Gejolak Resistensi Sampradaya di Media Sosial dan Kritik Terbuka terhadap Sampradaya

Narasi resistensi yang diamplifikasi di media sosial oleh tokoh-tokoh Hindu tradisional penentang sampradaya sukses membangun wacana publik mengenai implikasi buruk terhadap kelompok spiritual tersebut. Jika dicermati, dinamika berbagai bentuk penolakan yang dilakukan di ruang digital atas keberadaan sampradaya. Mulai dari kritik secara terbuka, membuka ruang literasi dan edukasi mengenai eksistensi sampradaya, kampanye dan aksi nyata, hingga wacana satire sebagai ruang kritik terhadap sampradaya.

Masifnya penolakan yang dilakukan elemen dan tokoh Hindu Bali terhadap keberadaan Sampradaya tidak terlepas dari tudingan beberapa ideologi dan organisasi transnasional sampradaya yang diayomi oleh PHDI Pusat yakni Hare Krishna (ISKCON) dan Sai Baba (SSGI) menjadi kontroversial akibat adanya polemik atau konflik sosial dalam bentuk penistaan agama Hindu dan apropriasi budaya. Apropriasi budaya merupakan tindakan dan perbuatan yang mengacu pada meminjam atau mencuri budaya dari kelompok minoritas untuk digunakan sebagai keuntungan pribadi, kelompok atau organisasi yang telah ditimbulkan para pengikut atau bhakta mereka dari tahun 1973an (Gayatri, 2021).

Penolakan terhadap sampradaya di Indonesia juga bisa dicermati dari hasil putusan Kejaksaan Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI no 107/JA/5/1984 (SK 107/1984) tentang Larangan Peredaran BarangBarang Cetakan yang memuat Ajaran Kepercayaan Hare Krsna (ISKCON) di Seluruh Indonesia. Pihak kontra sampradaya menilai kelompok Hare Krishna (ISCKON) dan Sai Baba (SSGI) merupakan sebuah ideologi dan organisasi transnasional sampradaya keagamaan dalam kegiatan spiritual di mana organisasi transnasional sampradaya ini menjadikan guru spiritual atau kerohaniannya sebagai "Tuhan yang Maha Esa".

Hal ini tentu tidak sejalan dengan ideologi, nilai dan norma dalam praktik keagamaan Hindu di Indonesia yang tidak menganut ajaran men-Tuhan-kan manusia. Bahkan dalam wawancara peneliti dengan Surya Anom (Juni 2024), aktivis dan Tokoh Hindu Bali ini menyatakan bahwa kelompok Hare Krishna (ISCKON) tidak memiliki afiliasi terhadap

Hindu. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Pimpinan Hare Krishna (ISCKON) dalam berbagai cuplikan video dokumeter maupun karya pemikirannya yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk mulai dari buku maupun naskah yang menjadi perbincangan di media sosial.

Kritik dan penolakan akan sampradaya atas fakta dan data di atas terus disuarakan di media sosial sampai saat ini oleh para aktivis dan tokoh-tokoh Hindu tradisional di Bali. Apropriasi budaya atau “pencurian budaya” yang lekat dengan tradisi Hindu Bali tidak terlepas dari kritik di ruang digital. Hal tersebut bisa di jumpai pada grup -grup Hindu di facebook seperti “Dresta Hindu Bali” . Komunitas virtual ini membagikan beragam informasi seputar sampradaya di tanah air terutama di Bali.

Gerakan Literasi Terhadap Narasi Sampradaya

Tokoh-tokoh Hindu yang kontra sampradaya sejak 2020 membangun narasi yang beragam dan edukatif mengenai ajaran-ajaran Hindu di ruang digital. Tudingan dan kritik terbuka yang dilakukan oleh pihak sampradaya melalui viralnya video-video propaganda penyebaran ajaran Hare Krishna dan Sai baba di media sosial dinilai menjadi ancaman untuk eksistensi tradisi, budaya dan agama di Bali bagi penggiat maupun aktivis *dresta* Bali.

Hal ini yang mendorong Surya Anom, salah satu tokoh penting dalam penolakan Sampradaya di Bali dan Pengurus PHDI Pemurnian konsisten, disiplin dan gigih menyebarkan gagasan dan pemikirannya di media sosial. Sejak 2019 hingga kini dari pengamatan peneliti, Surya Anom intens membuka ruang dialog dan menyadarkan umat Hindu di Bali mengenai Dresta Bali dan Hindu Nusantara yang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Pihaknya juga membandingkan bahwa secara ideologi, tata cara beragama hingga kultur Hindu Bali (Nusantara) berbeda dengan Hindu India. Seperti petakan wawancara berikut ini.

“Yah itulah bedanya India dengan Indonesia dan Bali khususnya.

Apakah suatu kesombongan menyatakan ajaran Hindu Bali beda dengan Hindu India. Tentu tidak, karena kita mesti meluruskan hal-hal yang tidak lurus akibat dari sama-sama memakai kata Hindu (Wawancara Tokoh Hindudharma, 19 Juni 2024).

Pada tulisan Surya Anom berjudul “Memahami Perbedaan Bali Dengan India” yang dimuat pada akun facebooknya (19 Juni 2024) dengan gamblang Surya Anom menegaskan Hindu Bali dan India sangat berbeda dalam konsep pemujaan. Hal tersebut tercermin dari masifnya perkembangan sekte-sekte yang ada di India. Para dewata yang disembah oleh umat Hindu India kemudian menjadi representasi Tuhan itu sendiri. “Apakah kita akan ikut-ikutan membuat Tuhan dari Dewa-dewa yang kita idolakan?” tegasnya dalam tulisan tersebut. Para pengikut sekte Wisnu menyatakan bahwa Dewa Siwa adalah bhakta Dewa Wisnu yang paling dihormati oleh Dewa Wisnu, sehingga beliau mengistimewakan Dewa Siwa untuk disembah umat. Sementara, pengikut lainnya bersebarangan. Menurutnya di lain pihak para pengikut sekte Siwa dipandang sebagai dewata agung para pengikut Wisnulah yang hormat kepada Dewa Siwa. Tidak sebatas itu saja, perkembangan sekte yang menjadikan pimpinan kelompok sampradaya di India menuhankan dan mendewakan manusia juga banyak dijumpai. Bahkan para pimpinan sampradaya India yang dipandang suci melakukan tradisi bertelanjang bulat di ruang publik kemudian dipuja oleh lawan jenis. Tentu jika hal tersebut diduplikasi di Bali atau Indonesia dinilai tidak sejalan dengan Hindu Dharma Indonesia dengan kearifan lokal Nusantara.

Aktivisme Digital: Riuh di Dunia Maya, Penutupan Asram di Dunia Nyata

Aktivisme di ruang digital mampu memobilisasi massa penolakan di berbagai daerah di Bali terhadap keberadaan kelompok Hare Krishna dan Sai Baba dengan melibatkan tokoh dan kelompok masyarakat di desa adat, komunitas Hindu dan Aktivistis Dresta Bali. Hal tersebut tercermin dari gerakan penolakan Ormas Hindu terhadap sampradaya berlanjut dan menyasar kantor Pemerintahan dan DPRD Bali pada 25 Oktober 2021 yang digerakkan oleh Aliansi Hindu Nusantara (AHN).

Demonstrasi yang dilakukan kian massif. Simbol-simbol budaya yang digunakan aktivis Hindu seolah memberikan pesan tersirat yakni sebagai tameng dan instrumen perlawanan terhadap kultur Sampradaya yang diidentikan dengan “Indiaisasi” (Fadli, 2014). Menariknya, dari pengamatan peneliti sejak 2020, tiap penolakan yang dilakukan di ruang publik oleh ormas-ormas Hindu memiliki wadah atau lembaga dengan nama yang berbeda-beda. Meskipun aktor-aktor yang terlibat sama. Jika dicermati, sesungguhnya gerakan penolakan sampradaya tidak semata fokus pada simpul-simpul pada wilayah perkotaan dan menyasar kalangan kelas menengah untuk memperoleh exposure pemberitaan luas. Namun juga menyasar pada lapisan masyarakat paling bawah yakni desa adat (pakraman) di Bali. Hal tersebut bisa dibuktikan dari deklarasi-deklarasi secara terbuka yang digelar di tiap-tiap desa adat di Bali untuk menghalau aliran Sampradaya dan menutup asram-asram, tempat berkumpulnya sampradaya.

Meme Sampradaya: Lelucon, Hiburan Hingga Panggung Otokritik

Secara teori, meme bisa didekati atau menggambarkan tiga komponen, yakni manifestasi (*manifestation*), kebiasaan (*behavior*), dan keidealan (*ideal*) (Davison, 2012:123). Dengan mencermati fenomena meme dan ruang public di media sosial, nampaknya meme sampradaya dijadikan instrumen kritik bagi para aktivis media sosial yang kontra atas keberadaan Hare Krishna dan Sai Baba. Kritik-kritik yang dibangun bisa dijumpai dari berbagai jenis meme di media sosial. Meme ini banyak dijumpai di grup-grup facebook seperti Dresta Hindu Bali dan Taksu Bali. Pada prinsipnya meme ini memberikan jargon dan kritik keras kepada Hare Krishna atau ISCKON sebagai kelompok organisasi yang berorientasi pada bisnis dengan “memasarkan ajaran Krishna sebagai sang pencipta” dengan berbagai narasi meyakinkan dari bagawadgita versi mereka.

Lahirnya konflik ditandai dengan adanya pertentangan atau penolakan. Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Irwandi & Chotim (2017) menyebutkan konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Perbedaan nilai dan keyakinan antara individual atau kelompok seringkali menjadi sumber utama konflik.

Gayatri (2021) menyebutkan, pondasi argumentasi penolakan masyarakat Hindu terhadap sampradaya karena ideologi sampradaya merupakan sistem kepercayaan dan agama tersendiri yang di luar negeri juga dikenal sebagai agama baru dengan istilah *new age movement*. Kedua, organisasi sampradaya ini menjadikan guru spiritual atau guru kerohaniannya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan nilai dan norma dalam praktik keagamaan Hindu di Indonesia yang tidak mengajarkan pemujaan manusia sebagai Tuhan. Selain itu, pernyataan dari para guru dan dokumen dari institusi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak berafiliasi dengan Hindu.

Ketua Pengurus Harian PDHI Pemurnian Provinsi Bali, Brigjen TNI (Purn) Ketut

Budiastawa menyatakan wacana tentang Ketuhanan yang Maha Esa yang sering digunakan oleh penganut sampradaya tidak sesuai dengan konteks Indonesia, karena dalam pandangan Hindu di Indonesia, Tuhan tidak dikultuskan sebagai manusia. Konteks Ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia harus merujuk pada konsep ketuhanan yang sesuai dengan dengan masing-masing agama yang diakui di negara ini. Dalam agama Hindu di Indonesia, Tuhan disebut Ida Sang Hyang Widi Wasa, dengan aturan keagamaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kearifan budaya Nusantara.

Penolakan sampradaya juga ditenggarai karena Hare Krishna dan Sai Baba adalah aliran transnasional asing, bukan Hindu dan menjadi ancaman mendegradasi keyakinan umat Hindu Dharma Indonesia dan tradisi Hindu dresta Bali dan dresta Nusantara. Sebagai organisasi transnasional asing, Hare Krishna dan Sai Baba membawa sejumlah agenda-agenda yang dicurigai mengintervensi serta mengkonversi keyakinan yang dilakukan dengan grand design 50 tahun Hare Krishna yang dinilai membahayakan Hindu Dharma Indonesia.

Dampak Resistensi Tokoh Hindu Bali Terhadap Sampradaya

Resistensi tokoh Hindu Bali terhadap kelompok sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba di media sosial menimbulkan berbagai dampak bagi umat Hindu. Media sosial telah menjadi platform yang kuat untuk menyuarakan pendapat, memperjuangkan kepercayaan, dan memperkuat identitas kelompok. Namun, dalam beberapa kasus, penggunaan media sosial juga bisa membawa dampak negatif yang signifikan, terutama ketika digunakan untuk resistensi terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Hal ini terjadi dalam konteks resistensi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Hindu Bali terhadap kelompok Sampradaya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan adalah sebagai berikut.

Pertama, perpecahan dalam komunitas Hindu Bali dan kelompok sampradaya. Resistensi yang terjadi di media sosial seringkali menciptakan kesenjangan dan memperkuat pemisahan antara kedua kelompok ini. *Kedua*, pencemaran nama baik kelompok Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba. Tokoh Hindu Bali yang melakukan resistensi terhadap sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba dengan menggunakan media sosial dapat mencemarkan nama baik kelompok tersebut dan pengikutnya. Serangan verbal, stereotip negatif, dan propaganda yang tidak berdasar dapat menyebabkan *image* yang buruk pada sampradaya dan pengikutnya, tanpa mempertimbangkan kebenaran atau keragaman dalam kelompok tersebut. Resistensi yang dipublikasikan di media sosial dapat memperkuat ketegangan antar kelompok agama dan kepercayaan. Ketika tokoh-tokoh Hindu Bali yang berpengaruh melakukan resistensi terhadap sampradaya, ini seringkali menghasilkan respons dari pihak-pihak yang mendukung sampradaya, menciptakan polarisasi yang lebih dalam dalam masyarakat. Hal ini memperumit dialog antar kelompok dan meningkatkan risiko konflik sosial.

4| SIMPULAN DAN SARAN

Resistensi tokoh Hindu Bali terhadap kelompok sampradaya, seperti Hare Krishna dan Sai Baba, telah menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada nilai-nilai persaudaraan yang diusung, potensi konflik tetap ada dan perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara penganut tradisi Hindu dan kelompok sampradaya, guna menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi ketegangan sosial. Kedepan diperlukan upaya untuk mendorong dialog yang lebih

terbuka dan inklusif antara penganut tradisi Hindu dan kelompok sampradaya. Hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara kedua belah pihak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari resistensi ini terhadap komunitas Hindu di Bali dan bagaimana interaksi antara tradisi dan modernitas dapat mempengaruhi praktik keagamaan di masa depan.

REFERENSI

- Adi, A., Suastra, I. M., Triguna, I. B. G. Y., & Gde, I. B. (2023). The Controversy Over Sampradaya and the Dynamics of Hindu Institution: Contestation of Hindu Elites in Palangka Raya City. *E-Journal of Cultural Studies*, 16(1), 43.
- Agustin, Monik, Sari. 2009. *Foucault Dan Komunikasi : Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7., No.3, September-Desember 2009.
- Budiasa, I. M. 2016. Tindakan Komunikatif Komunitas Veda Phosana Ashram Badung dalam Ritual Agni Hotra. *Jurnal Penelitian Agama Vidya Samhita* II(2), hal. 91-98.
- Bungin, B (2020). *Post Qualitative Social Research Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma Teori, Metode dan Laporan*. Jakarta : Kencana
- Devita, R. (17 Desember 2020). PHDI dan MDA keluaran keputusan Bersama Soal Sampradaya, Ini Tanggapan Gubernur Koster. Diakses pada : 16 Februari 2023. <https://www.balipost.com/news/2020/12/17/164000/PHDI-dan-MDA-Keluarkan-Keputusan...html>
- Dimas, B. (10 Juni 2022). APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. Diakses pada 20 Februari 2023. Sumber: <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>
- Dhona, H. R. (2019). Analisis wacana Foucault dalam studi komunikasi. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 9(2), 189-208.
- Dwipayana, A. A. G. N. A. (2021)Keluar Dari Pusaran: Aktivisme Hindu dalam Menghadapi Tantangan dan Masa Depan. Orasi Ilmiah. UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- Foucault, Michel. 2002. *Kegilaan Dan Peradaban*.Yogyakarta : Ikon Teralitera.
- Fadhil. 2014. Gerakan New Age-Agama Gado-Gado”. *Tempo* 19 Februari
- Fahmi, M. H., Widayati, S., & Setyaningsih, L. A. (2021, October). Upgrading keterampilan jurnalistik dan literasi media sebagai media exposed potensi desa melalui pengelolaan website. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* (Vol. 1, pp. 266-279).
- Faizin, B., Fitri, S. A., Maylawati, D. S. A., Rizqullah, N., & Ramdhani, M. A. (2025). Polarization of Religious Issues in Indonesia’s Social Media Society and Its Impact on Social Conflict. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), 426-442.
- Firdaus, M. R., & Sidik, M. D. H. (2024). Constructing Religious Legitimacy in the Digital Public Sphere: A Study of Islamic Discourse on Social Media. *Khazanah Theologia*, 6(2), 85-110.
- Gayatri, I. A. M. (2021). Gerakan masyarakat hindu menolak pengayoman ideologi dan

- organisasi transnasional Sampradaya di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 21(1), 105-122.
- Irwandi dan Chotim, Endah R. 2017. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. *JISPO*, Volume 7 (2).
- Jamhari, & Jajang, Jahroni. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kuckreja, R. (2022). The Hare Krishnas in Bali: Localized religion and new religious movement. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 12(1), 1-22.
- Nugroho, C. (2020). *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Jakarta : Prenada Media
- Rosidin, I. (24 Maret 2021). Oknum Sulinggih di Bali Diduga Cabuli Perempuan Bersuami. Diakses pada 20 Februari 2023. Sumber; <https://regional.kompas.com/read/2021/03/24/132149778/oknum-sulinggih-di-bali-diduga-cabuli-perempuan-bersuami?page=all>.
- Setiyaningsih, L. A. (2020). Media panics ibu rumah tangga setelah mengakses berita covid-19. *Jurnal Nomosleca*, 6(2), 101-110.
- Ulum, R., & Firdausi, L. (2021). Resistance of Hindu Traditionalist Against Sampradaya Hare Krishna Bali. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 6(02), 235-252.
- Priyanto, Joko. 2017. *Wacana, Kuasa, Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta: Tinjauan Relasi uasa Dan Pengetahuan Foucault*. *Jurnal Al'Qalam*, Vol.34, No.2 Tahun 2017 : 47-61.
- Widayati, S., Fahmi, M. H., Setiyaningsih, L. A., & Wibowo, A. P. (2021). Digital community development: Media pelestarian kearifan lokal wisata jurang toleh Kabupaten Malang. *Jurnal Nomolesca*, 7(1).
- Widiana, I. G. P. G. (2022). Dinamika Sampradaya di Bali. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 13(1), 50-68.